

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan tersebut ditentukan oleh sejumlah pihak yang terkait di antara kepala madrasah. Kepala madrasah merupakan salah satu pihak yang dinilai memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah sebagai pimpinan puncak di madrasah diharapkan mampu mewujudkan peran dan tugas pokok yang disandangnya, agar mengarah pada pencapaian tujuan dan hasil yang memadai. Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepala madrasah memiliki peranan sangat kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan menyalurkan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di madrasah, sehingga kualitas sumber daya manusia yang ada di madrasah dapat ditingkatkan dan dikembangkan.¹ Peranan kepala madrasah sangat penting untuk menjadikan sebuah madrasah pada tingkat yang efektif. Menurut Tirtahardja dan La Sula, kemampuan profesional kepala madrasah dan kemauannya untuk bekerja keras dalam memberdayakan seluruh potensi sumber daya madrasah menjadi jaminan keberhasilan sebuah madrasah. Untuk dapat menggunakan seluruh potensi sumber daya yang ada di madrasah maka kepala madrasah harus memahami peranannya.²

Kepala madrasah sebagai seorang pemimpin di suatu lembaga pendidikan harus mampu merespon segala yang ada dan terjadi di sekitarnya

¹ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

²Umar Tirtarahardja dan La Sula, *Pengantar Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 54.

serta memiliki *good will* untuk selalu melakukan perubahan dan pengembangan organisasi yang dipimpinnya. Hal ini sebagaimana yang disinyalir oleh Sondang P. Siagian dalam Baharuddin dan Umiarso, bahwa kepemimpinan tidak pernah bergerak dan berfungsi dalam suasana vakum. Ia bersifat situasional, kondisional, temporal, dan spatial.³ Dengan demikian, kepemimpinan akan bergerak dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dipimpinnya.

Kenyataannya, situasi di lapangan kerap kali mengindikasikan masih besarnya jumlah kepala madrasah yang menunjukkan kelemahan dalam mewujudkan peran dan pelaksanaan tugas pokoknya itu. Persoalan yang muncul adalah bagaimana agar kepala madrasah mampu untuk senantiasa mengembangkannya peran yang diembannya, antara lain sebagai manajer dan pemimpin. Sebagai manajer dan pemimpin, kepala madrasah memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan-kebijakan madrasah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Peningkatan mutu pendidikan di madrasah tidak semata-mata hanya tanggung jawab dari kepala madrasah. Pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dan masyarakat serta upaya pemerintah dalam menjembatani hubungan antara pihak madrasah dengan orang tua dan masyarakat, dengan demikian pemerintah membentuk suatu organisasi yang berguna sebagai wadah aspirasi orangtua dan masyarakat yang peduli terhadap kemajuan madrasah.

Peran serta masyarakat dalam pendidikan harus ditingkatkan. Peningkatan peran serta masyarakat berimplikasi lebih terjaminnya keberadaan dan kelangsungan lembaga madrasah, sehingga masyarakat lebih dapat menilai dan mengontrol terhadap program yang dilakukan madrasah. Masyarakat akan lebih peduli dan akan lebih mendukung program madrasah

³Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam Antara Teori dan Praktik*, Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 108.

agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, termasuk mendukung sumber dana dan pembangunan fisik madrasah. Dengan demikian peran serta masyarakat harus dimaksimalkan, sehingga dapat meminimalkan kendala atau hambatan yang dihadapi oleh madrasah.

Upaya peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan dan peningkatan mutu madrasah dikukuhkan dengan mencantumkan dewan pendidikan dan komite madrasah/madrasah. Hal tersebut secara lebih spesifik tertuang dalam pasal 56 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite madrasah atau komite madrasah yang berperan: 1) Dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah/madrasah. 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 3) Komite madrasah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.⁴

Tujuan dibentuknya komite madrasah salah satunya adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam kebijakan operasional. Seperti yang telah dikemukakan bahwa keberhasilan Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) tidak saja ditentukan oleh kepala madrasah, tetapi juga komite madrasah. Jika komite madrasah berperan aktif

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2006, hlm. 36-37.

dalam menyalurkan aspirasi siswa, orang tua dan masyarakat maka hasilnya akan sangat berkualitas.⁵

Madrasah dalam konteks otonomi daerah diharapkan lebih bergerak secara mandiri untuk meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, madrasah perlu memberdayakan masyarakat melalui komite madrasah dengan mengajak bekerja sama memanfaatkan potensi yang ada, sehingga semua sumber daya berkembang secara maksimal sesuai dengan kapabilitas masing masing. Pemberdayaan komite madrasah merupakan alternatif pengelolaan madrasah dengan harapan mampu mendorong terwujudnya mutu pendidikan yang optimal.

Keberadaan komite madrasah terkadang terbentur beberapa keterbatasan dan hanya dijadikan sebagai formalitas untuk melengkapi persyaratan administrasi madrasah. Pihak madrasah terkadang merasa terintimidasi dengan adanya komite madrasah. Bahkan ada sebagian persepsi dari wali murid yang masih menganggap bahwa komite madrasah hanya sebagai BP3 yang hanya menarik dana dari orang tua siswa. Tugas komite madrasah tidak semata memberikan sumbangan dana bagi madrasah tetapi juga berperan secara luas dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Peran komite madrasah juga tidak terlalu jauh mencampuri secara teknis manajerial madrasah. Hal tersebut dikarenakan merupakan wewenang kepala madrasah, tetapi juga tidak terlalu jauh meninggalkan peran yang harus dilaksanakan. Terkait dengan peran komite madrasah juga menunjukkan bahwa masih banyak pengurus komite madrasah yang tidak mengetahui ha-hal yang menjadi tugas untuk dilakukan. Komite madrasah hanya dijadikan sebagai simbol bagi pihak madrasah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hal ini merupakan pandangan yang menyimpang. Komite madrasah diharapkan mampu memberikan saran serta mendukung program-program yang diajukan madrasah. Komite madrasah harus dapat menjadi mitra kerja madrasah untuk

⁵ Marni dan Samino, "Pemberdayaan Komite Sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di SD Negeri Bulukantil Jebres Surakarta", Jurnal Profesi Pendidik, Volume 2 Nomor 1, Mei 2015, ISSN. 2442-6350, hlm. 15-16.

membantu meningkatkan mutu pendidikan di antaranya mengontrol kebijakan-kebijakan dari kepala madrasah.

Persoalan mendasar, bagaimana kepala madrasah dapat mengelola institusi pendidikannya secara baik dan terarah. Sejauh ini seperangkat kebijakan memang telah dikeluarkan sebagai instrumen bagi Kepala Madrasah dalam menjalankan pengelolaan madrasah. Namun kebijakan yang ada masih bersifat top down, sehingga kurang mengakar dan mampu membangkitkan sikap-sikap kreatif dan inovatif kepala madrasah dalam mengelola madrasahnyanya. Bahkan tidak jarang kepala madrasah terjebak dalam pelaksanaan tugas yang bersifat rutin, pasif, monoton sekadar memenuhi yang diintruksikan dan lain sejenisnya. Situasi sedemikian rupa lebih mengarah pada pencapaian tujuan hasil pendidikan yang cenderung kurang memuaskan.

Madrasah Tsanawiyah Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati merupakan salah lembaga pendidikan Islam tingkat menengah yang dalam pengelolaannya terdiri dari beberapa unsur yang meliputi: yayasan, kepala madrasah dan komite madrasah. Kepala madrasah diberikan hak secara otonomi oleh yayasan untuk mengelola pendidikan, mulai dari menyusun perencanaan program, pengembangan madrasah sesuai kebutuhan, maupun pengambilan-pengambilan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan madrasah. Sedangkan komite madrasah memiliki tugas dan fungsi memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada madrasah tentang kebijakan dan program pendidikan. Selain itu, komite madrasah juga berfungsi untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan penyelenggaraan pendidikan.⁶

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul “Peran Komite Madrasah dalam Mengontrol Kebijakan Kepala Madrasah (Studi Kasus di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati)”

⁶ Hasil Wawancara dengan Nur Khafid, Kepala MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tanggal 3 Desember 2016.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian peneliti tetapkan agar dalam penelitian ini lebih mengarah dan mempertajam penelitian ini.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah peran komite madrasah di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati dalam mengontrol kebijakan kepala madrasah di bidang penyusunan alokasi anggaran belanja madrasah dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan kepala madrasah dalam bidang penyusunan alokasi anggaran belanja madrasah dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati?
2. Bagaimana peran komite madrasah dalam mengontrol kebijakan kepala madrasah dalam bidang penyusunan alokasi anggaran belanja madrasah dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat peran komite madrasah dalam mengontrol kebijakan kepala madrasah dalam bidang penyusunan alokasi anggaran belanja madrasah dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan kepala madrasah dalam bidang penyusunan alokasi anggaran belanja madrasah dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati.

2. Untuk mendeskripsikan peran komite madrasah dalam mengontrol kebijakan kepala madrasah dalam bidang penyusunan alokasi anggaran belanja madrasah dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati.
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran komite madrasah dalam mengontrol kebijakan kepala madrasah dalam bidang penyusunan alokasi anggaran belanja madrasah dan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat di MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah dari segi teoritis maupun dari segi praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini menambah wawasan pengetahuan tentang peran yang diemban dan dilaksanakan oleh komite madrasah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberi gambaran pada pembaca mengenai kebijakan-kebijakan Kepala MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati
- b. Memberi masukan kepada komite dan pihak madrasah tentang pola hubungan yang baik dalam rangka menciptakan MTs. Raudlatut Tholibin Pakis Tayu Pati sebagai lembaga pendidikan yang lebih unggul dan lebih kompetitif sehingga menjadi tujuan para wali murid yang ingin melanjutkan anaknya ke madrasah.